

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Responden

a. Usia Responden

Usia merupakan salah satu karakteristik penilaian untuk menggambarkan piramida penduduk suatu daerah, selain itu usia responden dapat diperkirakan memiliki hubungan dengan cara berpikir seseorang. Untuk mengetahui keadaan kelompok usia responden dapat dilihat pada tabel 7 :

Tabel 7. Tingkat Usia Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Tingkat Usia (tahun)	Frekuensi (Jiwa)	Persentase (%)
1.	25 – 29	1	1,61
2.	30 – 34	2	3,23
3.	35 – 39	10	16,13
4.	40 – 44	22	35,49
5.	45 – 49	12	19,36
6.	50 – 54	7	11,29
7.	55 – 59	3	4,83
8.	60 – 64	1	1,61
9.	65 – 69	1	1,61
10.	70 – 74	2	3,23
11.	75 – 79	1	1,61
Jumlah		62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa frekuensi responden menurut usia sangat bervariasi dengan usia termuda dari 25 tahun, hingga lebih dari 76 tahun. Berdasarkan tabel 7, responden yang terbanyak berusia 40-44 tahun yakni sebanyak 35, 49% atau 22 responden, dan yang paling sedikit adalah yakni 1 responden berusia 25-29, 60-64, 65-69, dan 75-79 tahun.

b. Jenis Kelamin Responden

Responden penelitian ini adalah kepala keluarga di daerah relokasi berjumlah 62 KK. Berdasarkan hasil angket dapat dijelaskan bahwa frekuensi responden laki-laki sebanyak 57 jiwa (91,93%), sementara itu, responden perempuan terdapat 5 jiwa (8,07%).

c. Agama Responden

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa agama yang di anut oleh 62 responden adalah agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah penelitian tidak ada perbedaan agama, disebabkan karena penduduk Kecamatan Muara Sipongi yang menjadi daerah asal responden mayoritas beragama Islam.

d. Suku Responden

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bangsa responden terdiri dari suku ulu muara sipongi 56 responden (90,32%), dan suku mandailing 6 responden (9,68%), yang menyebabkan masyarakat memiliki budaya yang heterogen. Walaupun demikian kehidupan masyarakat relokasi hidup rukun antar tetangga, karena sudah merasa hidup sepenanggungan.

Suku mandailing yang ada di daerah relokasi menunjukkan bahwa di Kecamatan Muara Sipongi sudah terdapat bermacam-macam suku. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Muara Sipongi yang merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan provinsi Sumatera Barat.

e. Desa Asal Responden

Kecamatan Muara Sipongi terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang berada di daerah relokasi merupakan warga yang berasal Kecamatan Muara Sipongi yang terdiri dari Lingkungan III Kelurahan Pasar Muara Sipongi (Koto Rojo), Lingkungan IV Kelurahan pasar Muara Sipongi (Bukit Gudang), dan yang terakhir adalah Desa Bandar panjang. Dari hasil penelitian melalui angket dapat diketahui frekuensi responden menurut desa asal pada tabel 8 :

Tabel 8. Distribusi Desa Asal Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Desa Asal	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1.	Lingkungan III	31	50,00
2.	Lingkungan IV	21	33,87
3.	Bandar Panjang	10	16,13
Jumlah		62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari Tabel 8 dapat diketahui distribusi desa asal responden terbanyak yaitu responden yang berasal dari Lingkungan III Kelurahan Pasar Muara Sipongi berjumlah 50,00%, karena lokasi ini merupakan lokasi yang tepat berada dibawah perbukitan. Selanjutnya distribusi desa asal responden terbanyak ke dua adalah Lingkungan IV Kelurahan Pasar Muara Sipongi sebanyak 33,87%. Lingkungan IV Kelurahan Pasar Muara Sipongi berdekatan dengan Lingkungan III yang letaknya juga berada di bawah perbukitan. Sementara itu, yang paling sedikit yang berasal dari desa Bandar panjang sebanyak 16,13%. Menurut Badan Pusat Statistik 2012 ketiga daerah tersebut bertofografi lereng / punggung bukit yang sangat rentan dengan longsor.

f. Pekerjaan Responden

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan keluarga. Penduduk yang berada di daerah relokasi memiliki pekerjaan yang beragam mulai dari petani sawah, petani karet, buruh tambang emas, hingga pedagang. Untuk melihat jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 9 :

Tabel 9. Jenis Pekerjaan Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Petani Sawah	29	46,77
2.	Petani Karet	14	22,58
3.	Buruh Tambang Emas	18	29,03
4.	Pedagang	1	1,62
Jumlah		62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa pekerjaan responden di daerah relokasi lebih dominan adalah sebagai petani sawah sejumlah 46,77%. Pekerjaan sebagai petani sawah merupakan pekerjaan yang umum bagi penduduk di Kabupaten Mandailing Natal, begitu pula di Kecamatan Muara Sipongi. Sementara itu, yang paling sedikit adalah jenis pekerjaan pedagang sejumlah 1,62%.

g. Penghasilan Responden

Penghasilan responden adalah penghasilan yang di dapat selama satu bulan bekerja. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan responden bervariasi dari Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 10 :

Tabel 10. Tingkat Penghasilan Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Penghasilan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rp. 500.000,-s/d 1.000.000	20	32,25
2.	Rp. 1.000.100,-s/d 1.500.100	30	48,39
3.	Rp. 1.500.200,-s/d 2.000.200	12	19,36
Jumlah		62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Data pada tabel 10 menunjukkan bahwa rentang pendapatan Rp. 1.000.100,- s/d 1.500.100,-/bulan merupakan pendapatan yang paling banyak diterima oleh responden, yaitu sebanyak 48,39%, dan yang paling sedikit pada rentang Rp. 1.500.200,-s/d 2.000.200 sebanyak 19,36%.

h. Jumlah Tanggungan Responden

Jumlah tanggungan responden di daerah relokasi bervariasi mulai dari 1 tanggungan sampai dengan 5 tanggungan. Jumlah anak yang menjadi tanggungan adalah 540 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah tanggungan responden di daerah relokasi dapat dilihat pada tabel 11 :

Tabel 11. Jumlah Tanggungan Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi (KK)	Jumlah (Tanggungan x KK)	Persentase (%)
1.	0	1	0	1,62
2.	1	2	2	3,23
3.	2	11	22	17,75
4.	3	22	66	35,48
5.	4	23	92	37,09
6.	5	3	15	4,83
Jumlah		62	197	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 11 terlihat bahwa jumlah tanggungan responden terbanyak adalah yang memiliki tanggungan anak berjumlah 4 yaitu 37,09% dan yang paling

sedikit memiliki tanggungan anak berjumlah 1 yaitu 3,23%. Sedangkan responden yang sama sekali tidak memiliki tanggungan ada 1,62%.

2. Kualitas Rumah Responden

a. Bangunan Rumah

Bangunan rumah di daerah relokasi adalah seragam, dimana pondasi rumah terbuat dari batu, lantai rumah terbuat dari semen, dinding rumah terbuat dari papan, dan atap rumah terbuat dari seng. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi bangunan rumah yang belum pernah diperbaiki / sudah pernah diperbaiki dilihat dari lantai, pondasi, dinding, dan atap bisa dilihat pada tabel 12 :

Tabel 12. Kondisi Bangunan Rumah Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Kriteria Penilaian	Belum Pernah di Perbaiki		Sudah Pernah di Perbaiki	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Pondasi Rumah	62	100,00	0	0,00
2.	Lantai Rumah	38	61,29	24	38,71
3.	Dinding Rumah	30	48,39	32	51,61
4.	Atap Rumah	38	61,29	24	38,71

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Menurut tabel 12 dapat disimpulkan bahwa pondasi rumah responden belum pernah di perbaiki sebanyak 100%, hal ini dikarenakan pondasi yang di buat terbuat dari semen dan batu kali yang kuat. Belum ada satu pun pondasi rumah responden yang rusak.

Sementara itu untuk lantai rumah responden yang terbuat dari semen sebagian besar belum pernah diperbaiki adalah 61,29% dan lantai yang sudah pernah diperbaiki adalah 38,71%. Kondisi lantai yang sudah pernah diperbaiki

dikarenakan lantai rumah responden mengalami retak-retak bahkan pecah yang sudah tidak layak lagi digunakan.

Untuk dinding rumah responden sebanyak 48,39% sudah pernah diperbaiki, sementara itu untuk dinding rumah responden yang belum pernah diperbaiki adalah 51,61%. Berdasarkan hasil penelitian, dinding yang sudah pernah diperbaiki karena papan yang digunakan untuk dinding sudah mengalami pelapukan bahkan lepas sehingga masyarakat mengganti dengan dinding yang baru.

Atap rumah responden berupa seng mayoritas belum pernah diperbaiki sebanyak 61,29%, dan sebanyak 38,71% sudah pernah diperbaiki. Seng yang sudah pernah diperbaiki karena seng mengalami kebocoran ataupun sudah tidak layak digunakan oleh responden.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa mayoritas responden sudah pernah memperbaiki struktur rumahnya baik dari struktur lantai, dinding, maupun atap rumah, namun ada juga responden yang sama sekali belum pernah memperbaiki struktur rumahnya. Untuk melihat frekuensi responden yang struktur rumahnya sudah pernah diperbaiki ataupun frekuensi responden yang rumahnya belum pernah sama sekali ada perbaikan, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 13 :

Tabel 13. Perbaikan Rumah Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
1.	Lantai, Dinding, Atap	6	9,67
2.	Lantai, Dinding	8	12,90
3.	Lantai, Atap	3	4,83
4.	Dinding, Atap	7	11,29
5.	Lantai	8	12,90
6.	Dinding	10	16,12
7.	Atap	9	14,51
8.	Tidak Merubah Sama Sekali	11	17,74
Total		62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa responden yang memperbaiki struktur rumahnya adalah 82,26%, sedangkan responden yang belum pernah memperbaiki struktur rumahnya adalah 17,74%.

b. Lantai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh (100%) lantai rumah responden telah diplester/diperkeras. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar 9 :



Gambar 9. Kondisi Lantai Rumah Salah Satu Responden Tahun 2013

Secara keseluruhan lantai rumah responden di daerah relokasi kondisinya sudah di plester/diperkeras. Lantai yang di plester/diperkeras membuat masyarakat yang mendiami rumah relokasi selain terlihat bersih tetapi juga merasa nyaman untuk ditempati oleh responden.

c. Ventilasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ventilasi rumah responden seluruhnya (100%) memiliki jendela di kedua sisi ruang. Hal ini disebabkan karena rumah relokasi pada saat diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan rumah, kondisinya memiliki ventilasi dengan memiliki jendela di kedua sisi ruang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 10 :



Gambar 10. Salah Satu Jendela Sisi Kanan Rumah Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

Jendela yang terletak di sisi kanan rumah responden merupakan ventilasi yang ada di setiap rumah responden di daerah relokasi yang merupakan ventilasi ruang tamu. Selain jendela yang terletak di sisi kanan, rumah responden juga

memiliki jendela yang berukuran kecil yang letaknya di sisi kiri rumah responden seperti gambar 11 :



Gambar 11. Jendela Sisi Kiri Rumah Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

Berdasarkan hasil penelitian, jendela rumah responden pada gambar 11 adalah jendela yang terletak di sebelah kiri sisi rumah. Jendela tersebut merupakan ventilasi untuk kamar tidur. Walaupun jendela berukuran kecil dan kondisi jendela yang juga terbuat dari papan, tetapi jendela tersebut sudah memenuhi syarat untuk ventilasi yang baik bagi suatu rumah.

d. Genangan Air Hujan

Genangan air hujan yang ada di daerah relokasi tidak begitu banyak terlihat, dikarenakan drainase yang berfungsi baik. Berdasarkan hasil penelitian, rumah responden yang tidak ada genangan air hujan yaitu ada 56 rumah (90,32%) dan ada genangan 6 rumah (9,68%). Untuk lebih jelasnya mengenai drainase yang ada di daerah relokasi, dapat dilihat pada gambar 12:



Gambar 12. Drainase yang Ada Di Daerah Relokasi Tahun 2013

Berdasarkan gambar 12 terlihat bahwa di daerah relokasi dilengkapi dengan parit yang ada berguna untuk menampung air hujan agar tidak ada genangan.

e. Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan yang memadai adalah bangunan yang didirikan 60% dari luas lahan. Berdasarkan hasil penelitian, kepadatan bangunan di daerah relokasi sudah memadai yaitu luas lahan relokasi yang disediakan adalah seluas 3 ha. Luas lahan relokasi yang dipakai untuk pembangunan pemukiman warga yaitu seluas 1,5 ha (50%), dan luas lahan yang tersisa adalah 1,5 ha (50%).

f. Kepadatan Hunian

Kepadatan hunian masyarakat di daerah relokasi dilihat dari jumlah anggota keluarga. Berdasarkan tabel 11 sebanyak 59 responden (95,14%) yang memiliki kepadatan hunian yang tidak memadai, yaitu responden yang memiliki jumlah tanggungan lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14 :

Tabel 14. Kelayakan Huni Rumah Relokasi Tahun 2013

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1.	0	1	1,62
2.	1	2	3,24
3.	2	11	17,75
4.	3	22	35,48
5.	4	23	37,09
6.	5	3	4,84
Jumlah		62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 14 diketahui bahwa yang memadai sebanyak 3 responden (4,86%), yaitu responden yang menempati maksimal 3 orang atau yang mempunyai tanggungan lebih dari 1 orang.

3. Kondisi Relokasi Permukiman

a. Kondisi Rumah

Rumah responden di daerah relokasi berjumlah 200 unit yang terdiri dari 100 kopel, dimana untuk 1 kopel rumah terdiri dari 2 rumah yang dibangun bergandengan. Rumah di daerah relokasi terbagi menjadi 4 Blok. Fasilitas umum hanya terdapat pada Blok 1 saja, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 15 :

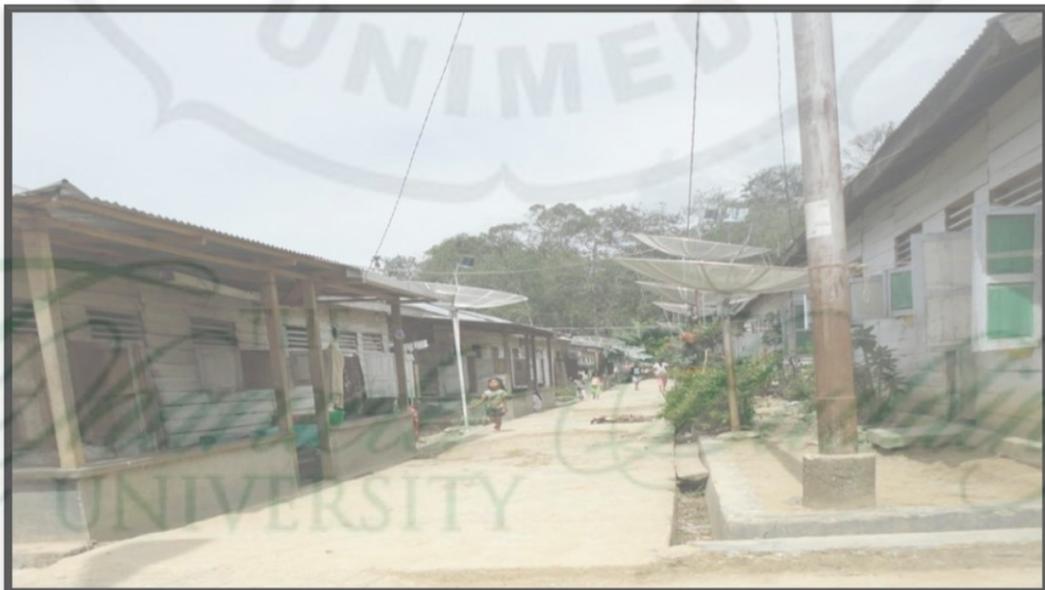
Tabel 15. Kondisi Rumah Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Blok	Rumah (unit)		Fasilitas Umum (unit)
		Ditempati	Tidak Ditempati	
1.	1	28	0	6
2.	2	105	13	0
3.	3	17	1	0
4.	4	28	2	0
Jumlah		178	16	6

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Rumah responden yang tersedia adalah 194 unit, tetapi saat dilakukannya penelitian hanya 178 rumah yang ditempati, sisanya 16 unit rumah ditinggalkan oleh penghuninya. Rumah yang paling banyak terdapat pada trap 2 yaitu sebanyak 118 unit, tetapi hanya ditempati sebanyak 105 unit. Sedangkan rumah yang paling sedikit terdapat pada trap 3 yaitu 18 unit, dan hanya ditempati 17 unit.

Ukuran rumah responden di daerah relokasi sebelumnya adalah seragam, namun ada masyarakat yang menambah ukuran rumah. Menurut peraturan pemerintah daerah Mandailing Natal mengenai ukuran rumah yang disediakan adalah 4X6 m. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat 27 responden (43,55%) yang menambah ukuran rumah, sedangkan yang tetap mematuhi peraturan dengan tidak menambah ukuran rumah 35 responden (56,45%). Untuk melihat lebih jelas mengenai rumah responden dapat dilihat pada gambar 13:



Gambar 13. Rumah Responden yang Berada di Daerah Relokasi Tahun 2013

Masyarakat yang merasa rumah relokasi tidak cukup lagi untuk menampung anggota keluarga biasanya memutuskan untuk tidak menempati rumah relokasi lagi, dan pindah ke daerah lain. Rumah relokasi yang ditinggalkan biasanya juga diberikan kepada sanak saudara terdekat untuk ditempati sementara. Masyarakat relokasi juga boleh menyerakan rumah kepada orang lain agar di tempati dengan perjanjian kepada pemilik kunci rumah relokasi dan dilaporkan kepada kepala lorong sebagai penanggung jawab relokasi. Berdasarkan data yang ada di kepala lorong daerah relokasi, hingga saat penelitian ini berlangsung sudah terdapat 7 pergantian menempati rumah relokasi.

b. Kondisi Mandi Cuci Kakus (MCK)

MCK yang ada di daerah relokasi terdiri dari 12 unit yang tersebar di setiap Trap yang digunakan masyarakat relokasi. Namun, kondisi MCK sebagian besar tidak berfungsi lagi (rusak). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 16 :

Tabel 16. Kondisi MCK di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Trap	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)	
			Baik	Rusak / Tidak Ada Air
1.	1	2	1	1
2.	2	7	1	6
3.	3	1	0	1
4.	4	2	1	1
Jumlah		12	3	9

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa MCK yang rusak paling banyak terdapat pada blok 2, padahal berdasarkan tabel 14, blok 2 adalah blok

yang paling banyak jumlah rumah. MCK yang masih digunakan masyarakat terdapat 3 unit. Untuk melihat kondisi MCK, dapat dilihat pada gambar 14 :



Gambar 14. MCK yang Berada di Daerah Relokasi Tahun 2013

MCK di daerah relokasi dipakai oleh sebagian masyarakat saja. Kondisi MCK yang rusak dan tidak ada air merupakan alasan masyarakat tidak menggunakan fasilitas MCK. Gambar 14 merupakan gambar MCK yang masih digunakan masyarakat relokasi walaupun dengan mengambil air dari tempat lain. Untuk mengetahui pemakaian MCK di daerah relokasi dilihat pada tabel 17 :

Tabel 17. Pemakaian MCK di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Pemakaian Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Selalu	13	20,96
2.	Jarang	28	45,16
3.	Tidak Memakai	21	33,88
Jumlah		62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 17 diketahui bahwa responden yang jarang menggunakan MCK sebanyak 28 responden (45,16%). Responden yang jarang memakai MCK

dikarenakan tidak adanya air, sehingga dipakai jika mendesak saja. Responden yang tidak memakai MCK yang ada sebanyak 21 responden (33,88%), Responden yang tidak memakai mck biasanya dikarenakan kondisi mck sudah tidak layak pakai. Responden yang selalu menggunakan MCK yaitu 13 responden (20,96%). Responden yang memakai MCK karena kondisi MCK masih baik.

Mck yang tidak ada airnya biasanya masih dipakai masyarakat dengan mengambil air dari sumber air yang baru di bangun pemerintah seperti gambar 15:



Gambar 15. Sumber Air yang Berada di Daerah Relokasi Tahun 2013

Sumber air yang berada di daerah relokasi terdapat 13 unit yang tersebar di permukiman relokasi. Jumlah tersebut masih tidak cukup menampung kebutuhan masyarakat, karena masyarakat sering kali antri untuk mendapatkan air. Namun, sebagian masyarakat berdasarkan hasil penelitian, lebih sering menggunakan sungai untuk keperluan sehari-hari seperti gambar 16 :



Gambar 16. Sungai di Daerah Relokasi Tahun 2013

Sungai yang terletak di pinggir permukiman warga relokasi merupakan sungai Batang Gadis, yang dipakai masyarakat sehari-hari. Selain karena kondisi Mck yang tidak memadai, kebiasaan masyarakat menggunakan sungai untuk semua keperluan merupakan tradisi di Kecamatan Muara Sipongi maupun Kecamatan Kotanopan, karena sungai mengalir di sepanjang permukiman penduduk. Banyaknya MCK yang rusak menyebabkan masyarakat beralih menggunakan sungai yang berada di dekat permukiman yang digunakan untuk mandi, mengambil air bersih bahkan menyuci.

c. Kondisi Sumber Penerangan

Pada saat menempati rumah relokasi tahun 2007, pemerintah tidak menyediakan sumber penerangan Listrik. Masyarakat yang tinggal di daerah relokasi hanya menggunakan lampu minyak dan lilin sebagai sumber penerangan. Kondisi yang demikian berlangsung selama 1 tahun dikarenakan masyarakat mengharapkan pemerintah memasukkan listrik ke daerah relokasi. Namun, tidak

ada tanda-tanda akan adanya bantuan pemerintah akan listrik, maka masyarakat pun berinisiatif untuk memasang listrik secara pribadi. Beberapa masyarakat yang memasang listrik, dengan kesediaan menerima masyarakat lain yang ingin menyambung arus karena belum mampu memasukkan listrik. Hingga saat ini di daerah relokasi berdasarkan hasil penelitian mayoritas sudah menggunakan PLN walaupun hanya menyambung arus dengan tetangga yang sudah memakai listrik. Untuk melihat rumah di daerah relokasi sudah memakai listrik dapat dilihat pada gambar 17 :



Gambar 17. Daerah Relokasi Sudah Memakai Listrik Tahun 2013

Pada gambar 17 terlihat tiang listrik dan kabel listrik yang menunjukkan bahwa listrik sudah masuk di daerah relokasi. Responden yang sudah memakai sumber penerangan PLN adalah 60 responden (96,78%), yang memakai Genset sebanyak 2 responden (3,22%).

d. Kondisi Jarak Menjangkau Sekolah

Sekolah yang ada di daerah relokasi berupa 1 unit Sekolah Dasar. Tetapi jalan untuk menuju sekolah adalah mendaki. Untuk melihat kondisi jalan yang mendaki menuju sekolah dapat dilihat seperti gambar 18 :



Gambar 18. Jalan mendaki dari pemukiman relokasi menuju sekolah dasar di daerah relokasi tahun 2013

Anak-anak yang berada di daerah relokasi setiap hari bersekolah di Sekolah Dasar yang ada di daerah relokasi walaupun jalan menuju sekolah adalah mendaki. Sementara itu, untuk anak-anak yang bersekolah tingkat SMP ataupun SMA bersekolah ke Kecamatan Muara Sipongi yang menjadi daerah asal, atau ke Kecamatan Kotanopan. Sebelum di relokasi, untuk tingkat SMP ataupun SMA anak-anak biasanya bersekolah dengan berjalan kaki menuju sekolah, kondisi saat ini mereka harus mengeluarkan biaya ongkos untuk bersekolah dikarenakan jarak relokasi ke Kecamatan Kotanopan tidak memungkinkan anak-anak berjalan kaki menuju sekolah.

e. Kondisi Jarak Menjangkau Tempat Bekerja

Mata pencarian penduduk yang ada di daerah relokasi adalah berdagang, buruh tambang emas, dan petani. Khususnya petani sawah, masyarakat relokasi masih kembali ke daerah asal untuk menggarap lahan pertanian milik mereka. Sementara itu, masyarakat yang berdagang pergi ke Pasar Muara Sipongi untuk berjualan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan ada 7 tempat bekerja responden seperti tabel 18 :

Tabel 18. Tempat Bekerja Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Tempat Bekerja	Jarak (Km)	Jumlah Responden	Cara Menjangkau
1.	Pasar Muara Sipongi	3,00	12	Angkutan Umum
2.	Desa Muara Botung	1,00	2	Berjalan kaki
3.	Desa Tanjung Alai	4,50	8	Angkutan Umum
4.	Desa Bandar Panjang	3,50	7	Angkutan Umum
5.	Koto Rojo	3,50	3	Angkutan Umum
6.	Bukit Gudang	4,00	21	Angkutan Umum
7.	Ranjo Batu	15,00	9	Angkutan Umum

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 18 di atas diketahui bahwa pekerjaan responden mayoritas berada di Kecamatan Muara Sipongi, walaupun memakai angkutan namun angkutan umum jarang sehingga tempat bekerja sukar untuk di tempuh. Namun, ada juga reponden yang tempat bekerjanya di Kecamatan Kotanopan.

f. Kondisi Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah di daerah relokasi saat ini masyarakat masih berstatus memakai bukan memiliki. Kondisi seperti ini dikarenakan belum jelasnya status hukum masyarakat yang berada di daerah relokasi. Masyarakat secara hukum masih berstatus warga Kecamatan Muara Sipongi, sementara itu

rumah yang ditempati di daerah relokasi adalah wilayah Kecamatan Kotanopan. Tidak adanya titik temu menyebabkan surat tanah belum dikeluarkan hingga saat ini.

g. Kondisi di Lokasi Permukiman

Lokasi relokasi merupakan pemindahan 3 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Sipongi. Bergabungnya 3 desa menjadi 1 desa sementara, namun secara administrasi masyarakat relokasi masih pulang ke desa awal mereka jika ada keperluan secara administrasi. Selain keperluan untuk administrasi, masyarakat relokasi juga melakukan kunjungan ke desa asal. Di daerah relokasi sendiri walaupun masih berstatus sementara, tetapi masyarakat relokasi layaknya sebagai satu desa yang sering melakukan kerja bakti, atau musyawarah desa.

Bergabungnya 3 desa menjadi 1 menyebabkan responden merasa senang dengan tetangga yang ada di daerah relokasi, karena secara budaya mereka masih sama walaupun berasal dari desa yang berbeda. Rentang waktu relokasi yang sudah lama menyebabkan responden sudah jarang mengunjungi tetangga di desa asal mereka kecuali responden yang datang untuk bekerja. Tetapi mayoritas responden masih sering mengunjungi desa asal dikarenakan sanak saudara responden masih ada di desa asal yang mendirikan ulang rumah yang telah rusak.

Lama tinggal di lokasi relokasi ternyata tidak membuat responden setuju menjadi warga resmi Kecamatan Kotanopan. 100% responden berdasarkan hasil penelitian menjawab tidak setuju dipindahkan menjadi warga kecamatan Kotanopan.

Daerah relokasi sejak tahun 2007 mempunyai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai penerima bantuan rumah. Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan responden mengenai peraturan yang ada di daerah relokasi mayoritas mengetahuinya walaupun tidak semua peraturan diketahui responden. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 19 :

Tabel 19. Peraturan di Daerah Relokasi yang Diketahui Responden Tahun 2013

No	No Peraturan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	1.rumah relokasi masih milik pemerintah	16	25,80
2.	2.rumah no1-6 trap 1 untuk umum	18	29,03
3.	3.tidak ada izin mendirikan bangunan lain	62	100,00
4.	4.penanggung jawab rumah relokasi	12	19,35
5.	5.pinjaman tertulis untuk menempati rumah	17	27,41
6.	6.pinjaman tertulis yang terlanjur menempati	34	54,84
7.	7.dilarang merubah bentuk bangunan	62	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 19, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang paling banyak diketahui oleh responden adalah peraturan No 3 dan No 7, dimana 62 responden (100%) mengetahuinya. Peraturan no 3 adalah tentang siapa penanggung jawab relokasi yang dinamai sebagai kepala lorong, dan peraturan no 7 adalah dilarangnya merubah bentuk bangunan hunian untuk kepentingan pribadi. Sedangkan peraturan yang paling sedikit diketahui responden adalah peraturan no 4 sebanyak 19,35%.

Sementara itu mengenai harapan responden terhadap daerah relokasi adalah seragam. Harapan responden berdasarkan hasil penelitian adalah segera mendapatkan surat kepemilikan rumah yang sudah dijanjikan pemerintah sejak tahun 2007 tanpa harus menjadi warga resmi Kecamatan Kotanopan.

4. Respon Fungsional Terhadap Relokasi Permukiman

Respon fungsional masyarakat terhadap relokasi permukiman beragam. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap rumah, sarana dan prasarana, surat tanah yang sudah dijanjikan, serta respon masyarakat terhadap lokasi relokasi.

a. Terhadap Rumah

Banyaknya responden yang menambah ukuran rumah dikarenakan responden merasa ukuran rumah di daerah relokasi sudah tidak cukup untuk menampung anggota keluarga. Untuk lebih jelasnya mengenai respon fungsional terhadap rumah dapat dilihat pada tabel 20 :

Tabel 20. Respon fungsional Terhadap Rumah di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Pendapat Responden	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Memadai	3	11	33	17,74
2.	Kurang Memadai	2	13	26	20,97
3.	Tidak Memadai	1	38	38	61,29
Jumlah			62	97	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 20 dapat di ambil kesimpulan bahwa mayoritas responden berpendapat tidak memadai dengan kondisi rumah mereka. Responden yang berpendapat tidak memadai berjumlah 61,29%. Responden yang berpendapat tidak memadai karena rumah responden sudah terlalu sempit untuk menampung anggota keluarga yang ada. Responden yang berpendapat kurang memadai berjumlah 20,97%, sedangkan responden yang berpendapat memadai berjumlah 17,74%. Responden yang berpendapat memadai karena jumlah anggota keluarga

tidak terlalu banyak. Sebagian responden berpendapat tidak memadai walaupun demikian mereka memilih menetap di daerah relokasi, walaupun ada juga yang memutuskan pindah. Berdasarkan total skor yang diperoleh sebanyak 97, Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa respon terhadap rumah di daerah relokasi adalah termasuk kategori respon kurang baik dengan skor 97. (Perhitungan lihat lampiran 6).

b. Terhadap MCK

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas respon fungsional terhadap MCK adalah tidak memadai sebanyak 127 responden (71,35%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 21 :

Tabel 21. Respon Terhadap MCK di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Kondisi MCK	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Tidak Memadai	1	44	44	70,97
2.	Kurang Memadai	2	4	8	6,45
3.	Memadai	3	14	42	22,58
Jumlah			62	94	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 21 diketahui bahwa responden yang berpendapat MCK tidak memadai sebanyak 70,97%. Responden yang berpendapat MCK kurang memadai sebanyak 6,45%, dan responden yang berpendapat MCK memadai sebanyak 22,58%. Respon terhadap MCK di daerah relokasi adalah kurang baik dengan skor 94. (Perhitungan lihat lampiran 6).

c. Terhadap Sumber Penerangan

Sumber penerangan di daerah relokasi berupa listrik, menyebabkan masyarakat merasa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena sebelumnya di daerah asal responden sebagian besar masyarakat sudah memakai listrik. Untuk melihat respon fungsional masyarakat terhadap sumber penerangan di daerah relokasi dapat dilihat pada tabel 22 :

Tabel 22. Respon fungsional Terhadap Sumber Penerangan di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Pendapat Responden	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Cukup	3	61	183	98,39
2.	Kurang	2	0	0	0,00
3.	Tidak Cukup	1	1	1	1,61
Jumlah			62	184	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 22 dapat diketahui bahwa responden yang merasa cukup terhadap sumber penerangan adalah sebanyak 98,39%. Responden yang merasa cukup dikarenakan sudah memakai listrik sehingga memudahkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Responden yang merasa tidak cukup sejumlah 1,61%. Responden yang merasa kurang atau tidak cukup dikarenakan responden belum mampu memasukkan listrik, dan hanya menggunakan lampu minyak serta genset untuk sumber penerangan di rumah. Respon fungsional terhadap sumber penerangan adalah baik dengan skor 184. (Perhitungan lihat lampiran 6).

d. Terhadap Jarak Menjangkau Sekolah

Jarak lokasi relokasi yang berjarak 3 Km ke Kecamatan Muara Sipongi, membuat jarak sekolah anak-anak yang berada di kecamatan Muara Sipongi menjadi jauh. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah telah membangun Sekolah Dasar (SD) yang terletak di daerah relokasi, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, anak-anak yang berada di daerah relokasi tetap bersekolah ke sekolah asal mereka atau ke Kecamatan Kotanopan. Kondisi yang demikian membuat masyarakat sukar untuk menempuh sekolah. Untuk mengetahui respon fungsional menjangkau sekolah dari tempat relokasi dapat di lihat pada tabel 23 :

Tabel 23. Respon fungsional Menjangkau Sekolah Dasar di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Pendapat Responden	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Mudah	3	2	6	1,68
2.	Sedang	2	5	10	12,36
3.	Sukar	1	53	53	85,96
Jumlah			178	69	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Berdasarkan tabel 23, responden yang memberikan pendapat sukar menjangkau sekolah adalah responden yang menempati rumah relokasi pada blok 1 dan blok 2, karena selain mendaki untuk menuju sekolah, rumah masyarakat pada blok 1 harus melewati jembatan menuju ke sekolah. Sedangkan responden yang menjawab sedang dan mudah adalah responden yang menempati rumah relokasi pada blok 4. Respon fungsional masyarakat terhadap jarak menjangkau sekolah adalah kurang baik dengan skor 69. (Perhitungan lihat lampiran 6).

e. Terhadap Jarak Menjangkau Tempat Bekerja

Kondisi saat ini, responden harus mengeluarkan biaya untuk menuju tempat bekerja sehingga pendapat responden mengenai lokasi relokasi dalam menjangkau tempat bekerja adalah jauh sebanyak 62,90%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 24 :

Tabel 24. Respon fungsional Menjangkau Tempat Kerja di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Pendapat Responden	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Jauh	1	39	39	62,90
2.	Sedang	2	21	42	33,87
3.	Dekat	3	2	6	3,23
Jumlah			62	87	100,00

Sumber : Data Primer, 2013

Mayoritas responden merasa jauh dalam menjangkau tempat kerja. Responden yang menjawab jauh berjumlah 62,90%, sebanyak 33,87% responden menjawab sedang, sedangkan responden yang menjawab mudah sebanyak 3,23%. Berdasarkan tabel 24, diketahui bahwa respon fungsional terhadap jarak menjangkau tempat kerja adalah kurang baik dengan skor 87. (Perhitungan lihat lampiran 6).

f. Terhadap Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan rumah responden yang masih belum jelas menyebabkan responden tidak puas karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responden merasa tidak puas terhadap janji pemerintah akan status kepemilikan rumah sebanyak 62 responden (100,00%).

Status kepemilikan rumah yang tidak jelas menyebabkan responden tidak menerima dengan status kepemilikan rumah. Responden yang tidak menerima mengenai status kepemilikan rumah sebanyak 62 (100,00%), artinya respon masyarakat terhadap status kepemilikan rumah adalah kurang baik dengan skor 62. (Perhitungan lihat lampiran 6).

g. Terhadap Lokasi Relokasi

Setelah di relokasi, trauma atau kecemasan responden akan bencana alam menjadi berkurang. Tetapi sebagian responden mengaku masih cemas akan adanya longsor terutama responden yang menempati rumah relokasi yang berada di dekat perbukitan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kecemasan responden dapat dilihat pada tabel 25:

Tabel 25. Kecemasan Responden di Daerah Relokasi Tahun 2013

No	Kecemasan Responden	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Masih Cemas	1	12	12	19,35
2.	Kurang Cemas	2	15	30	24,20
3.	Tidak Ada Cemas	3	35	105	56,45
Jumlah			178	147	100,00

Sumber : Data Primer Olahan, 2013

Dari tabel 25 diketahui bahwa sebagian besar responden sudah tidak ada perasaan cemas akan bencana alam yaitu sebanyak 56,45%. Responden yang masih merasa cemas sebanyak 19,35%, dikarenakan pada blok 4 rumah penduduk masih berada di dekat perbukitan, walaupun sudah di buat sengkedan. Sementara itu responden yang menjawab kurang sebanyak 24,20%. Berdasarkan tabel 25 diketahui respon fungsional masyarakat terhadap lokasi relokasi adalah baik

dengan skor 147, artinya masyarakat sudah tidak merasa cemas lagi akan bencana alam setelah di relokasi. (Perhitungan lihat lampiran 6).

B. Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini disajikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lapangan, urutan pembahasan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu tentang kondisi rumah masyarakat yang berada di daerah relokasi serta respon masyarakat terhadap relokasi.

1. Kondisi Rumah Masyarakat Relokasi di Kecamatan Kotanopan

Setelah penelitian ini dilakukan, maka dapat diperoleh data bahwa bangunan rumah di daerah relokasi yang belum pernah diperbaiki adalah pondasi rumah. Bangunan rumah yang sudah pernah diperbaiki adalah lantai, dinding dan atap rumah. Lantai rumah yang sudah pernah diperbaiki adalah 38,71%, dinding rumah sebanyak 51,61%, dan atap rumah yang sudah pernah diperbaiki adalah sebanyak 38,71%. Secara umum rumah warga relokasi sudah mengalami perbaikan, artinya struktur bangunan rumah relokasi tidak awet dan permanen sehingga mendorong warga untuk memperbaikinya, tetapi ada juga masyarakat yang struktur bangunan rumahnya belum pernah ada perbaikan baik dari lantai, dinding, atap, maupun pondasi rumah. Banyaknya rumah yang belum ada perbaikan yaitu sebanyak 17,74% rumah.

Sementara itu, untuk syarat rumah sehat sederhana menurut peraturan Permen PU No. 54/PRT/1991, rumah masyarakat di relokasi sudah memenuhi standar minimum rumah sehat sederhana. Lantai rumah masyarakat di daerah relokasi sudah diperkeras atau di plester 100%, untuk ventilasi rumah sudah

memiliki jendela di kedua sisi ruang 100%. Selain itu, genangan air hujan di daerah relokasi 90,32% rumah relokasi tidak mempunyai genangan air hujan di depan atau sekitar rumah, dikarenakan kondisi pemukiman yang berbukit sehingga air hujan yang ada mengalir ke bawah dan bermuara ke sungai, serta adanya drainase berupa parit di daerah relokasi. Lahan relokasi yang dipakai untuk bangunan rumah dan fasilitas umum sebanyak 1,5 ha atau setengah dari luas lahan relokasi, sehingga kepadatan bangunan di daerah relokasi ini sudah sesuai dengan Permen Pu. Sementara itu untuk kepadatan hunian di daerah relokasi memiliki kepadatan hunian yang tidak memadai sebanyak 95,14%. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah anggota keluarga lebih dari 3 orang. Rumah relokasi yang ada hanya mampu menampung 3 anggota keluarga agar memenuhi syarat rumah sehat.

2. Respon masyarakat Terhadap Relokasi di Kecamatan Kotanopan

Respon adalah suatu reaksi baik positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat akibat adanya penerimaan. (Poewadarminta, dalam Hutasoit 2011). Respon fungsional masyarakat di daerah relokasi adalah respon fungsional mengenai bangunan rumah adalah masyarakat yang berada di daerah relokasi merasa tidak memadai dengan ukuran rumah yang hanya berukuran 4X6, yaitu 61,29%. Oleh karena itu, banyak ditemukan masyarakat yang menambah ukuran rumah tanpa ada izin dari pemerintah. Tidak adanya sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar peraturan untuk tidak menambah ukuran rumah, menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat di daerah relokasi, dan pada akhirnya masyarakat menjadi seolah tak peduli dengan peraturan yang ada.

Di daerah relokasi, selain rumah, pemerintah juga menyediakan MCK yang tersebar di pemukiman masyarakat relokasi. Sumber air yang dipakai pada MCK yang ada di daerah relokasi bersumber dari air sungai. Saat ini, kondisi MCK di daerah relokasi sebagian sudah tidak bisa dipergunakan lagi disebabkan karena tidak adanya air dan Mck yang rusak sebanyak 9 unit, sedangkan yang masih berfungsi adalah 3 unit. Respon fungsional masyarakat terhadap MCK adalah MCK di daerah relokasi sudah tidak memadai sebanyak 70,97%. Kondisi Mck yang rusak dan tidak ada air menyebabkan banyak warga yang menggunakan sungai untuk keperluan sehari-hari. Tetapi, saat ini pemerintah daerah sudah membeikan bantuan berupa sumber air yang di pasang tersebar di permukiman warga relokasi.

Sumber penerangan di daerah relokasi saat ini sudah menggunakan listrik. Kondisi ini berbeda saat tahun pertama mereka mendiami daerah relokasi yang tanpa listrik. Menurut keterangan masyarakat, pemerintah tidak menyediakan listrik, jadi saat ini mereka menggunakan listrik adalah atas inisiatif sendiri dan biaya sendiri. Walaupun tidak semua masyarakat mampu membayar pemasangan listrik, mayoritas masyarakat sudah memakai listrik dengan cara menyambung arus. Masyarakat yang sudah menggunakan listrik adalah 98,38%, sehingga respon fungsional masyarakat terhadap sumber penerangan sebanyak 98,39% merasa cukup dengan adanya listrik.

Di lokasi relokasi, pemerintah juga mendirikan Sekolah Dasar (SD) yang saat ini digunakan oleh anak-anak relokasi untuk bersekolah, walaupun anak-anak harus mendaki untuk mencapai sekolah setiap harinya. Tetapi, lain halnya untuk anak-anak yang duduk di bangku SMP atau SMA, mereka harus keluar menuju

Kecamatan Muara Sipongi atau Kecamatan Kotanopan. Respon masyarakat mengenai jangkauan menuju SD adalah mayoritas mengatakan Sukar 85,96%, karena kondisi sekolah berada di atas perbukitan, walau demikian jalan menuju sekolah berupa aspal, sehingga tidak berbahaya jika turun hujan. Tenaga pengajar di SD daerah relokasi adalah tenaga pengajar yang berasal dari Kecamatan Muara Sipongi, baik pegawai negeri maupun honornya. Sedangkan respon masyarakat mengenai jangkauan menuju sekolah tingkat SMP atau SMA adalah mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk bersekolah, dimana dahulu masyarakat terbiasa berjalan kaki menuju sekolah yang berada di Kecamatan Muara Sipongi.

Walaupun sudah lama tinggal di daerah relokasi, tetapi masyarakat masih sering berkunjung ke Kecamatan Muara Sipongi yang merupakan daerah asal masyarakat. Selain alasan bersekolah, mata pencaharian masyarakat yang berdagang di pasar Muara sipongi juga menyebabkan masyarakat datang untuk berdagang setiap hari kamis yang merupakan hari Pekan, selain itu hanya pasar Muara Sipongi yang letaknya dekat dengan pemukiman masyarakat relokasi. Selain berdagang, masyarakat relokasi juga masih menggarap sawah mereka di daerah asal. Untuk menjangkau tempat kerja, masyarakat merasa sulit. Salah satu alasannya adalah adanya biaya (ongkos) untuk pergi bekerja. Ongkos angkutan umum dari daerah relokasi ke pasar Muara Sipongi adalah Rp.3000,00, hal inilah yang sangat memberatkan masyarakat relokasi dimana dahulu mereka tidak mengeluarkan biaya untuk menuju tempat bekerja. Sehingga respon masyarakat terhadap tempat bekerja adalah masyarakat merasa jauh untuk menjangkau tempat kerja sebanyak 96 orang 62,90%.

Salah satu yang menjadi perdebatan saat ini adalah mengenai status kepemilikan rumah. Masyarakat merasa tidak puas dengan janji pemerintah yang akan memberikan surat kepemilikan tanah. Belum adanya titik temu antara masyarakat relokasi dengan Pemerintah Daerah Mandailing Natal yang menyebabkan kondisi carut marut saat ini. Pemerintah Mandailing Natal merekomendasikan masyarakat yang berada di daerah relokasi pindah menjadi warga resmi Kecamatan Kotanopan karena wilayah relokasi merupakan wilayah Kecamatan Kotanopan. Sementara itu, masyarakat yang berada di daerah relokasi menolak dengan alasan kultur budaya sudah berbeda. Kondisi yang demikian berlangsung hingga saat ini, banyak upaya yang dilakukan masyarakat agar segera memberikan hak rumah, termasuk melakukan demo ke kantor Bupati Mandailing Natal.

Untuk status kepemilikan rumah masyarakat di daerah relokasi tidak puas dengan janji pemerintah, tetapi masyarakat menerima saja dengan status menumpang. Masyarakat menerima saja dikarenakan masyarakat sudah beberapa kali mendatangi kantor Bupati untuk meminta kejelasan mengenai status hukum warga, tetapi belum ada hasilnya hingga saat ini. Mengenai harapan masyarakat di daerah relokasi adalah segera mendapatkan surat tanah agar merasa nyaman tinggal di daerah relokasi.

Sementara itu, untuk di daerah relokasi, respon fungsional masyarakat terhadap lokasi relokasi sebanyak 56,45% merasa sudah tidak lagi cemas akan bencana alam.